

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pasca reformasi dan berlakunya kekuasaan orde baru telah mendorong timbulnya suara semakin kuat untuk menggagas konsep otonomi daerah. Dan saat aplikasi konsep otonomi daerah semakin terlihat, termasuk beberapa undang-undang dan peraturan yang menjelaskan tentang itu. Ada penjelasan politik yang mendorong kuat ke arah pembentukan otonomi daerah, salah satunya konsep desentralisasi kekuasaan. Dimana pada masa orde baru sistem sentralisasi menjadi begitu dominan, pengambilan kekuasaan sering dilakukan dengan menerapkan sistem sentralisasi, termasuk pemilihan kepala daerah hanya ditunjuk dan disetujui oleh pusat. Namun dengan penerapan otonomi daerah semua itu akan jelas berbeda.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur di daerah untuk memanfaatkan potensinya. Namun persoalannya ternyata cukup kompleks karena kecurigaan dan kekhawatiran

terjadinya disintegritas menjadi alasan pemerintah pusat untuk secara hati-hati merumuskan kebijakan ekonomi daerah.¹

Otonomi sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kajian mengenai sentralisasi dan desentralisasi menjadi sangat menarik jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu negara layak atau tidak untuk menerapkannya. Terdapat tujuh faktor yang mendorong suatu negara akan memakai desentralisasi atau cenderung memakai sentralisasi adalah faktor sifat dan bentuk negara, razim yang berkuasa, geografis, warga negara, sejarah, efisiensi dan efektifitas dan politik. Jika dihubungkan dengan negara Indonesia maka jelas tujuh faktor tersebut dapat diterapkan di negara ini.²

Di Negara Indonesia sendiri, otonomi daerah nampaknya sudah menjadi kebutuhan dasar guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di negara ini yang memiliki karakteristik kewilayahan yang sangat rumit dari sisi geografis dan sosiologis kemasyarakatan yang sangat kompleks. Kondisi geografis yang seperti itu tentunya akan menyulitkan penerapan sentralisasi, jangkauan pemerintah pusat ke daerah terlalu jauh sehingga tidak jarang daerah-daerah tertentu yang jauh pemerintahan pusat tidak tersentuh oleh

¹ Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi (UPFE-UMY), 2007), hlm. 143.

² Irham Fahmi, *Ekonomi Politik; Teori dan Realita*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 201-202.

program-program pembangunan. Kebijakan otonomi daerah untuk saat ini nampaknya merupakan keputusan yang dianggap terbaik yang diambil oleh bangsa ini. Kondisi tersebut dipandang perlu untuk dibentuk alat-alat perlengkapan setempat yang disebarakan ke seluruh wilayah negara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di daerah.³

2. Otonomi Daerah dan Pembangunan

Otonomi daerah ternyata telah membawa banyak perubahan pada pembangunan daerah. Daerah memiliki kebebasan lebih dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Namun kebebasan yang diberikan tersebut bukan tanpa kontrol dari pemerintah pusat. Penerapan manajemen yang terukur menjadi penting untuk diterapkan dan dipahami.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didik R. Rachbini bahwa otonomi dan kemandirian di tingkat manapun pada dasarnya harus didasarkan pada rumusa pokok adanya basis sistem yang demokratis, pemerintah daerah akan terjebak ke dalam jurang baru seperti pusat yaitu otoritarianisme.⁴ Suatu pembangunan akan berlangsung dengan baik apabila perangkat peraturan yang mendukung kearah tersebut dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Acuan pembuatan perangkat

³ Vielta Imelda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukann Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2016), hlm 78.

⁴ Didik J. Rachbini, *Politik Ekonomi Baru Menuju Promosi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 39-40.

aturan otonomi daerah harus mengacu pada konsep asal dari visi otonomi daerah, visi otonomi daerah dibangun dengan memperhatikan 4 dimensi yaitu dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁵

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2008, lambat laun beberapa kewenangan pemerintah pusat mulai didesentralisasikan ke daerah kecuali untuk enam kewenangan yaitu kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional serta agama. Tujuan desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintahan daerah dengan rakyatnya melalui pengembangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.⁶

Jenis-jenis desentralisasi serta ranah desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat ke daerah yaitu:

- a. Desentralisasi politik; seperti pembagian kewenangan
- b. Desentralisasi administrasi; pembagian kewenangan
- c. Desentralisasi fiskal; pembagian keuangan berdasarkan *Money Follow Function*
- d. Desentralisasi ekonomi; inisiatif ekonomi lokal

Kemudian dari sistem desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat, salah satu yang menjadi tonggak berlangsungnya pembangunan suatu daerah yaitu desentralisasi ekonomi. Agar pelimpahan tugas

⁵ Irham Fahmi, *Ekonomi...*, hlm. 203.

⁶ Marselina Djayasinga, *Membedah APBD*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 21-22.

desentralisasi itu berjalan baik, pemerintah memberikan kewenangan sumber-sumber pendapatan daerah, sebagai berikut:⁷

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah dan retribusi daerah (UU No. 28/ 2009)
 - 2) Hasil pengelolaan kekeayaan daerah yang dipisahkan
 - 3) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan (Transfer Daerah)
 - 1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - 2) Dana alokasi umum (DAU)
 - 3) Dana alokasi khusus (DAK)
 - 4) Dana insentif daerah (DID)
- c. Pinjaman daerah (pusat, daerah lain, perbankan)
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Dana bagi hasil pajak dari provinsi
 - 2) Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Struktur, sifat, prinsip serta sistem penyusunan APBD mempunyai kesamaan dengan penyusunan APBN yang didasarkan pada UU No. 17 tahun 20013. APBD disusun menggunakan prinsip-prinsip anggaran yang berlaku di tingkat nasional, disusun dengan menggunakan format I *Account* sehingga bersifat *unbalanced budget*, dengan tahun anggaran menggunakan tahun kalender dan dikelola secara transparan, partisipasi

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

dan akuntabilitas dan mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial di daerah, seperti inflasi, suku bunga, jumlah pengangguran.

Tabel 2.1
Struktur APBD

Kode Rekening	Uraian
1	PENDAPATAN
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1	Pajak Daerah
1.1.2	Retribusi Daerah
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah
1.1.4	Lain-lain Usaha PAD
1.2	DANA PERIMBANGAN
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.2.4	Dana Urusan Bersama (DUB)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
II	BELANJA
2.1	APARATUR DAERAH
2.1.1	Belanja Administrasi Umum (BAU)
2.1.1.1	Belanja pegawai
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan
2.1.2	Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP)
2.1.2.1	Belanja Pegawai
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan
2.2.3	Belanja Pembangunan
2.2	PELAYANAN PUBLIK
2.2.1	Belanja Administrasi Umum (BAU)
2.2.1.1	Belanja Pegawai
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan
2.2.2	Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP)
2.2.2.1	Belanja Pegawai
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan
2.2.3	Belanja Pembangunan
2.3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
2.4	BELANJA TIDAK TERSANGKA
	Jumlah Belanja

	Surplus/ Defisit
--	------------------

Sumber: Marselina Djayasinga, *Membedah APBD*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 20-21.⁸

Namun konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah provinsi atau kabupaten harus mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki.

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional

⁸ Marselina Djayasinga, *Membedah APBD*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 20-21.

dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁹

Keuangan pusat sangat mempengaruhi keuangan daerah. Hal tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan daerah dari sumbangan pusat. Dana yang dikelola oleh daerah dalam struktur APBN dimasukkan dalam pos Dana Perimbangan. Dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dijelaskan proses perhitungan, pembagian dan perimbangan ke daerah. Dana perimbangan dialokasikan untuk bagi hasil pajak dan non pajak, DAU, dan DAK. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pos DAU dan DAK masing-masing 25% dari total APBN. DAU lebih dipereuntukkan bagi pemerataan pembiayaan di daerah dimana daerah bebas menggunakan DAU. Kontribusi DAU terhadap total penerimaan daerah sangat dominan, yaitu sebesar 50% - 60% sehingga turunnya DAU dari pemerintah pusat sangat ditunggu-tunggu daerah dan besarnya RAPBD akan menunggu dahulu perolehan DAU dari pusat.¹⁰

3. Otonomi Daerah dan Pemerataan Pembangunan

Salah satu lahirnya otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Artinya dengan otonomi daerah diharapkan daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur keuangannya sendiri, lebih jauh lagi dengan wewenang tersebut tingkat kesejahteraan

⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 40.

¹⁰ *Ibid*,

masyarakat akan dapat ditingkatkan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Tujuan lain dari otonomi daerah dilihat dari sisi kepentingan Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *potensial equality*, artinya daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah
- b. Untuk menciptakan Lokal *Accountability* artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat
- c. Untuk mewujudkan Lokal *Responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan untuk mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pembangunan daerah erat kaitannya dengan proses desentralisasi pembangunan yang berkembang pada saat ini. Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang,

dan terarah agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kebijaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari kebijaksanaan pembangunan sektoral, pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun investasi swasta. Kebijakan pembangunan daerah yang ditempuh oleh pemerintah paling tidak meliputi 5 (lima) aspek:

- a. Pembangunan daerah dan desa
- b. Prasarana fisik desa
- c. Perluasan kesempatan kerja di daerah
- d. Tata ruang dan penataan pertanahan
- e. Peningkatan kemampuan daerah

Dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah, dilaksanakan pembinaan aparatur pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan personal dan mematangkan fungsi lembaga pemerintah daerah melalui kerangka ekonom daerah dan desentralisasi. Selain itu, juga diupayakan penelitian mengenai daerah, desa dan kota yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sah bagi pembuat kebijaksanaan maupun pelaksana dalam menjalankan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan.¹¹

¹¹ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 45-48.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan jumlah pengeluaran pemerintah

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap suatu penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, maka semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar pula

kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.¹²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut.¹³

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.¹⁴

Menurut Abdul Halim, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan

¹² Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹³ Chindy Febry Rori, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-20013*, *Jurnal Ekonomi*, Volume 16, No. 02, 2016, hlm. 247.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 247.

yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁶

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/ impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing

¹⁵ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 94.

¹⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat...*, hlm. 51- 52.

daerah. Contohnya pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang/ jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/ impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/ retribusi atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.¹⁷

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah. Potensi tersebut jika dimanfaatkan secara bijaksana dan profesional akan menghasilkan produk yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD

Pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi selama ini telah melakukan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk membiayai pembanguana tersebut diperlukan dana yang besar. Oleh sebab itu pemerintah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan dengan cara menggali segala sumber dana/ penerimaan yang potensial yang ada di daerah masing-masing. Sumber dana yang dapat digali lebih lanjut oleh daerah adalah PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan lain-lain usaha yang sah. Peningkatan proporsi PAD terhadap APBD selayaknya diharapkan meningkat dan sebaliknya proporsi sumbangan dan bantuan diharapkan menurun. Hal ini untuk menunjukkan semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi harus selalu melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

Berikut ini yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi:

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁹

Prinsip-prinsip pengenaan pajak daerah berdasarkan kriteria Smith atau dikenal dengan *SMITH'S CAN-ON* yaitu:²⁰

- 1) Keadilan (*equity*), bahwa pengenaan beban pajak harus adil
- 2) Kenyamanan (*convience*), bahwa pembayaran pajak merupakan hal yang menyenangkan bagi wajib pajak
- 3) *Ability to Pay* bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan bayarnya.
- 4) Efisien dan ekonomis bahwa penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya atau ongkos pungut (CCER= *cost collection efficiency ratio* yaitu total penerimaan pajak dibandingkan dengan upah pungut).

Kemudian fungsi ekonomi pajak daerah yaitu:²¹

- 1) Fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak dikumpulkan untuk mengumpulkan penerimaan negara/ daerah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah
- 2) Fungsi pengaturan (*regulator*), yaitu pajak dikenakan untuk mengatur transaksi ekonomi yang terkait dengan objek pajak

¹⁹Ujang Bahar, *Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri*, (Kembangan: Jakarta Barat, 2009), hlm. 140.

²⁰ Marselina Djayasinga, *Membedah...*, hlm. 17.

²¹ *Ibid*,

3) Fungsi distribusi, yaitu ketika pajak dikenakan dalam rangka pemerataan pendapatan antar warga masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak air permukaan
- 5) Pajak rokok

a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

²² Bratakusumah dan Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 283.

b. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang menduduki peranan penting yaitu bagian pemerintah daerah atas laba BUMD untuk tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:²³

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/ BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah terdiri dari hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Jenis-jenis pendapatan lain yang sah meliputi:²⁴

²³ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Blu*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang, 2009), hlm. 37.

²⁴ *Ibid*, hlm. 37-38.

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

C. Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian suatu negara, karena menentukan kondisi perekonomian negara tersebut. Beberapa teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli, seperti Wagner, Peacock dan Wisman, Rostow dan Musgrave.

Menurut Wagner yang dikutip oleh Basuki Pujoalwanto, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan

birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Wegner sendiri menamakannya hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat.²⁵

Peacock dan Wiseman mengungkapkan pendapat yang dikutip oleh Basuki Pujoalwanto, dalam rangka menjelaskan tentang perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Dalam pengertian bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang terlampau besar.²⁶

Masyarakat memiliki batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Tingkat toleransi inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak sewenang-wenang. Basuki Pujoalwanto kembali mengutip dalam bukunya, menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula.²⁷

²⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 176.

²⁶ *Ibid*,

²⁷ *Ibid*,

Hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.²⁸

- a) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana.
- b) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Dalam suatu proses pembangunan rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil.
- c) Pada tahap lanjut, pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan sebagainya.²⁹

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Purbayu Budi Santosa dan Retno Fuji Rahayu, Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1 / lull 2005: 9 – 18, hlm. 11-12.

harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan digolongkan ke dalam tiga golongan diatas.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, nampak jelas bahwa pengeluaran pemerintah menjadi sandaran bagi jalannya perekonomian. Pengeluaran pemerintah menjadi roh bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi suatu negara.

2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan:

a) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara.

b) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum dan bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana

fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi.³⁰

Pengeluaran pemerintah ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran yaitu 1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, 2) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, 3) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (*transfer payments*). Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi:

- a) Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- b) Pengeluaran memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
- d) Menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Pengeluaran pemerintah pada dasarnya meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan yang dirinci atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga mengeluarkan uang untuk subsidi-subsidi, pensiun, bantuan sosial, dan sebagainya. Termasuk transfer yang dikurangkan dari penerimaan pajak,. Transfer ini bukanlah pembelian hasil produksi tahun yang berjalan dan bukan

³⁰ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis...*, hlm. 178.

juga balas karya faktor produksi. Oleh karena itu, tidak ikut diperhitungkan dalam pembelanjaan nasional (walaupun dicantumkan dalam APBN). Pengeluaran pemerintah menunjukkan kecenderungan naik terus, mengikuti perkembangan produksi nasional dan pertumbuhan penduduk.³¹

3. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran yang dilakukan setiap periode tertentu bergantung pada banyak faktor. Yang penting diantaranya: jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.³²

a) Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi tentang jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

Setiap perekonomian akan mengutip pajak dan beberapa pungutan pemerintah yang lain. Salah satu tujuan pengutipan pajak tersebut adalah untuk mengenakan pembayaran keatas jasa-jasa yang disediakan pemerintah. Disamping itu ia

³¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 180.

³² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 168-169.

bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan berbagai golongan masyarakat dan daerah. Tujuan lain yaitu untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat di masa depan.³³

a) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Peranan pemerintah sangat penting dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi kearah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, pemerintah seringkali membelanjakan uang jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak.

Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang amat lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur - irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha-usaha tersebut membutuhkan banyak uang, dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.

³³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 108.

b) Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di negara di dunia. Keadaan tersebut akan mengakibatkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan negara luar juga akan menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

4. Peranan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa premis dalam masyarakat bahwa: 1) komposisi output yang ada seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu dalam masyarakat 2) preferensi tersebut digunakan untuk didesentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian tidak dipegang oleh swasta. Sebuah perekonomian ideal yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumber daya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Namun dalam kenyataannya, pasar tidak selalu hadir dalam wujud yang ideal. Perekonomian Indonesia sering kali terlilit oleh polusi dan

monopoli seiring dengan meningkatnya inflasi atau pengangguran dan pada praktiknya distribusi pendapatan dalam masyarakat *Laissezfaire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil peranan yang penting dalam perekonomian.³⁴

Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilitas. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah harus juga mempejuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.³⁵

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota). Pada masing-masing tingkatan pemerintah ini dapat memiliki keputusan akhir proses

³⁴ Basuki Pujoyalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis...*, hlm. 179.

³⁵ *Ibid*, hlm. 180.

pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak merupakan sumber utama perbelanjaan pemerintah. Sebagian pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

D. Jumlah Penduduk

1. Pengertian Kependudukan

Cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak menarik perhatian para ahli ekonomi adalah ilmu tentang kependudukan (demografi). Hal tersebut karena penduduklah yang melakukan kegiatan ekonomi. Kualitas dan kuantitas penduduk suatu negara merupakan penentu yang paling penting bagi kemampuan produksi serta standar hidup suatu negara. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan penduduk menjadi hal yang sangat menarik untuk untuk diperhatikan yaitu karena penduduk

merupakan sumber tenaga kerja, *human resources*, disamping sumber faktor produksi *managerial skill*.³⁶

Dorongan yang timbul dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan tersebut kepada luas pasar. Pertumbuhan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan berbagai sektor perusahaan barang maupun jasa akan bertambah juga. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk akan menimbulkan pertambahan dalam produksi dan kegiatan ekonomi.³⁷

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁸ Akibat buruk dengan adanya pertumbuhan ekonomi khususnya pada wilayah yang kemajuan ekonominya belum tinggi namun sudah mengalami masalah kepadatan penduduk. Hal ini terjadi apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Akibatnya produktifitas marjinal penduduk adalah rendah, hal ini berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi. Adapun jika bertambah, hal

³⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 85-86.

³⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 430.

³⁸ <https://jatim.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab1>

tersebut akan bertumbuh lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk.³⁹

2. Teori Penduduk Malthus

Konsep yang dibangun oleh Malthus adalah *The Law Of Diminishing Returns*. Masalah utama yang dibicarakan didalam konsep tersebut adalah masalah tenaga kerja sebagai input proses produksi. Menurut pandangan Malthus tentang kependudukan adalah bahwa penduduk apabila dibiarkan saja, maka jumlahnya akan berkurang secara deret ukur. Jika deret ukur itu bergerak cepat dan akhirnya menjadi sedemikian besar sehingga tidak ada tempat lagi di bumi ini bagi seluruh manusia untuk menghuninya. Di sisi lain, Malthus melanjutkan alat-alat pemuas kebutuhan manusia berkembang, namun lambat.⁴⁰

Dari pandangan tersebut Malthus selanjutnya menyatakan bahwa jumlah penduduk akan selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan, jumlah penduduk itu dibatasi oleh tersedia atau tidaknya alat-alat pemuas kebutuhan dan perkembangan jumlah penduduk dapat dihambat dengan dua macam *cheks*, yaitu yang pertama *positive checks*, dimana terdiri dari penyakit, bencana kelaparan, penyakit sampar, malapetaka perang, dan sebagainya dan yang kedua,

³⁹ *Ibid*, hlm. 431.

⁴⁰ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Mikro*, Cet ke-10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 86.

repressive atau *preventive checks* yang berbentuk penundaan perkawinan dan *moral restraint* (pengekangan moral).

Pendapat Malthus yang dikutiip oleh Suherman Rosyidi, saat jumlah penduduk telah berlipat-lipat kali lebih besar, maka bumi yang luas ini pada akhirnya akan menjadi terasa sempit, sampai pangan dan alat-alat pemuas kebutuhan yang lainnya jauh dibawah tingkat yang dibutuhkan oleh kehidupan. Oleh karena berlakunya *the law diminishing returns* maka alat-alat pemuas kebutuhan hidup tidak dapat mengejar deret ukur pertumbuhan jumlah penduduk.⁴¹

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan masyarakat yang tinggal di suatu daerah, secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, jumlah penduduk adalah kumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 87.

Pertambahan penduduk menurut deret ukur dan produksi makanan menurut deret hitung. Pertambahan penduduk yaitu jumlah kelahiran (natalitas) meningkat dan mortalitas sedikit menyebabkan peningkatan populasi penduduk yang memerlukan sarana dan prasarana untuk hidup berkualitas. Kajian (ontologi) tekanan terhadap meningkatnya jumlah penduduk mempunyai korelasi terhadap kerusakan keseimbangan alam. manusia merupakan penyebab potensi perubahan komposisi perbedaan status sosial dan utamanya kemiskinan yang menimbulkan berbagai kehilangan keragaman hayati.⁴²

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.⁴³ Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang

⁴² Arwin Surbakti, *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015): hlm. 3.

⁴³ Agus Widarjono. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas*, (Jurnal, 1999), hlm. 78.

memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.⁴⁴

Analisis ekonomi tentang posisi penduduk sebenarnya sudah dimulai sejak Adam Smith yang mengemukakan bahwa sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur:

- 1) sumber manusiawi (jumlah penduduk),
- 2) sumber alam,
- 3) *stok capital* yang ada. Menurut Smith sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum dari pertumbuhan perekonomian.

Akan tetapi, Smith kurang menekankan aspek penduduk, dengan menganggap bahwa penduduk memiliki peran pasif yang hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja dalam proses produksi (pertumbuhan ekonomi).

Pertumbuhan penduduk diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kata perkapita dapat menunjukkan sudut pandang yang perlu dicermati, yaitu sisi output total (dalam hal ini sisi GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Dengan demikian, proses kenaikan output perkapita, tetap harus dianalisis dengan jalan mencermati tentang apa saja yang terjadi dengan output total dan

⁴⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.93.

jumlah penduduk, sehingga jelas bahwa penduduk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, dan dalam perkembangan selalu berkaitan.⁴⁵

Jumlah penduduk seringkali menjadi persoalan bagi suatu negara ataupun di daerah. Masalah jumlah penduduk yang begitu banyak baik di negara-negara yang terbelakang maupun negara-negara berkembang sudah lama terjadi. Namun tidak selamanya jumlah penduduk menjadi permasalahan bagi suatu perekonomian. Seperti yang terjadi di Eropa Barat bahwa pertumbuhan penduduk justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk ternyata banyak membantu ekonomi negara karena mereka sudah makmur dan modalnya melimpah, sedangkan jumlah buruh berkurang. Sedangkan dampak negatifnya, pertumbuhan penduduk yang cepat berarti memperberat tekanan pada lahan pekerjaan dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Serta masalah penyertaan pangan yang semakin banyak jumlahnya. Pertumbuhan penduduk terutama berpengaruh yang sangat besar baik dalam hal pendapatan per-kapita, standar kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja, tenaga buruh, maupun dalam hal pembentukan modal.⁴⁶

Pendapat David Ricardo yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita bahwa bila jumlah penduduk dan akumulasi modal bertambah secara terus menerus, maka ketersediaan tanah (lahan) yang subur akan

⁴⁵Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 106-107.

⁴⁶Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.78-79.

berkurang jumlahnya atau semakin langka. Maka akibatnya sewa tanah yang subur akan lebih tinggi daripada tanah yang kurang subur. Pengolahan tanah yang subur akan memperoleh penghasilan dan keuntungan yang tinggi, sehingga mampu membayar sewa tanah yang tinggi. Rahardjo Adisasmita juga mengutip pendapat Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus konsekuensinya adalah permintaan akan bahan pangan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan tingkat pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung, artinya akan terjadi ketimpangan yang semakin besar antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak terhadap semakin menurunnya tingkat kemakmuran penduduk.⁴⁷

4. Teori Peralihan Kependudukan

Teori peralihan kependudukan didasarkan pada kecenderungan penduduk sebenarnya di negara maju di dunia. Menurut teori ini, setiap negara selalu melewati tiga tahap pertumbuhan penduduk yang berbeda, yaitu:⁴⁸

a. Tahap pertama

Pada tahap ini, angka kelahiran, begitu juga angka kematian tinggi dan laju pertumbuhan penduduk rendah.

⁴⁷ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 24.

⁴⁸ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.410.

a. Tahap kedua

Pada tahap ini, angka kelahiran tetap stabil tetapi angka kematian turun dengan cepat. Akibatnya laju pertumbuhan penduduk meingkat pesat.

b. Tahap ketiga

Pada tahap terakhir, angka kelahiran mulai menurun dan cenderung sama dengan angka kematian. Sehingga laju pertumbuhan penduduk rendah.

E. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi sering disebut dengan penyertaan modal. Istilah lain yang sering digunakan yaitu *capital investment* (investasi modal). Istilah lain yang lazim digunakan yaitu penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dimasa mendatang. Namun adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah hangus dan perlu didepresikan.

Dalam studi ekonomi makro investasi dikaitkan langsung dengan *financial resources* yang tersedia pada pasar keuangan khususnya yang dapat disediakan oleh industri perbankan. Itu sebabnya analisis tentang investasi sebagai keputusan akhir para enterpreuner dipetakan sebagai fungsi dari *cost of capital* suku bunga, meski tidak dapat disangkal bahwa teeknologi dan sumber daya lainnya adalah fakta yang menentukan arah investasi.⁴⁹

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran sebagai berikut:

- a) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- b) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lain.
- c) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.⁵⁰

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang

⁴⁹ Sudjono Budhi, *Makro Ekonomi: Aplikasi untuk Indonesia*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 71.

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi...*, hlm. 121-122.

telah didepresiasi. Apabila nilai investasi bruto dikurangi dengan depresiasi maka akan didapat investasi neto.

2. Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan perkaitan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk kurva fungsi investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi, 2) fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh.

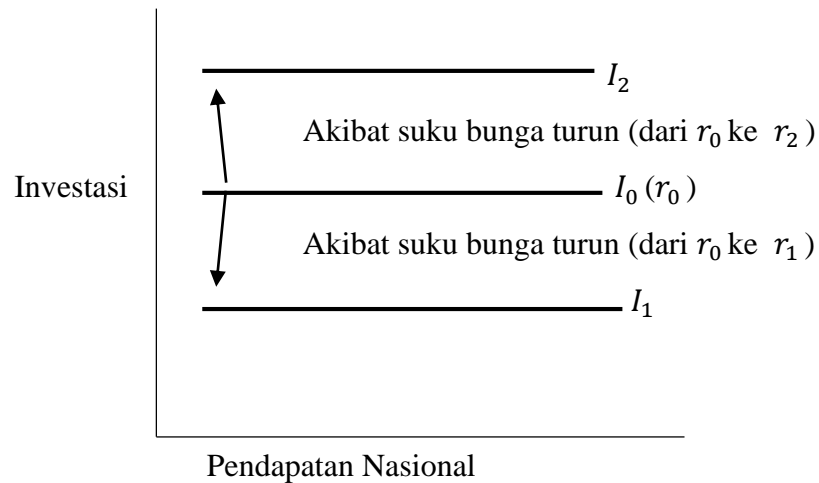
Investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Investasi yang bercorak otonomi dibedakan menjadi:

- a) *Direct foreign investment* adalah investasi yang terlaksana secara langsung antar negara
- b) *Indiced investment* adalah investasi yang terlaksana akibat pertumbuhan uang dan masyarakat
- c) *Otonomous investment* adalah investasi yang berdasar kepada tabungan nyata⁵¹

Dengan kata lain, tingkat pendapatan nasional tidak mempengaruhi jumlah investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan.

⁵¹ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)), hlm. 34.

Gambar 2. 1
Fungsi Investasi dan Perubahannya



Sumber: Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)⁵²

Tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap jumlah investasi. Berdasarkan pandangan ini maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti digambarkan oleh kurva 2.1. Analisis makroekonomi bukannya mengabaikan pengaruh tingkat pendapatan nasional kepada investasi. Namun para ahli ekonomi menganggap bahwa faktor tersebut bukan faktor yang paling penting penentu tingkat investasi. Apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang. Sedangkan jika suku bunga turun akan mendiring jumlah investasi lebih banyak. Perubahan suku bunga yang memoengaruhi investasi digambarkan oleh kurva I_1 dan I_2 . Apabila suku bunga r_0 maka investasi I_0 . Apabila suku bunga

⁵² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi...*, hlm. 127.

turun ke r_2 maka akan menyebabkan penambahan investasi yang digambarkan oleh I_2 . Dan apabila suku bunga naik r_1 maka terjadi penurunan investasi yang digambarkan oleh kurva I_1 .

3. Penentu-Penentu Tingkat Investasi

Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga) yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, penanam-modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka melainkan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan dimasa mendatang untuk memperoleh keuntungan, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian.⁵³ Faktor-faktor utama penentu tingkat investasi adalah:

a) Tingkat keuntungan yang diramalkan

Ramalan mengenai keuntungan di masa yang akan datang akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang memiliki prospek yang baik untuk dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

⁵³ Lia Amalia, *Ekonomi...*, hlm. 122.

b) Suku bunga

Suku bunga disini dapat menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melakukan penanaman modal apabila tingkat pengembalian dari investasi yaitu presentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi dengan bunga yang dibayar, lebih besar daripada nilai bunga.

c) Ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan

Perusahaan-perusahaan yang berkembang melakukan kegiatan tentunya menggunakan peralatan yang baru dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan tentunya perusahaan-perusahaan seperti itu akan melakukan investasi yang juga lumayan memakan waktu beberapa tahun. Dan apabila investasi tersebut sudah selesai dan perusahaan tersebut sudah mulai menghasilkan barang atau jasa, maka ia akan melakukan usahanya selama beberapa tahun. Dalam investasi yang seperti itu, biasanya modal akan diperoleh kembali ketika kegiatan produksi sudah berjalan selama beberapa tahun.

Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah usaha yang dilakukan tersebut akan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian, maka perusahaan perlu melakukan peramalan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Dalam

melakukan peramalan tersebut, hal penting yang harus dianalisis adalah keadaan yang menunjukkan kondisi keuntungan yang akan diperoleh apakah cukup besar dari pengembangan kegiatan ekonomi yang sedang direncanakan.

Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian termasuk situasi politik dari keamanan menjadi lebih baik di masa mendatang yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong investasi. Semakin baik kondisi di masa datang, akan semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha.

d) Kemajuan Teknologi

Faktor yang menyebabkan besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha yaitu kegiatan produksi yang menggunakan penemuan-penemuan teknologi baru baru. Kegiatan penggunaan teknologi baru dalam proses produksi ini dinamakan dengan pembaruan atau inovasi. Pada umumnya, semakin banyak teknologi baru yang berkembang di dunia usaha, maka semakin banyak pula kegiatan pembaruan atau inovasi yang dilakukan dalam proses produksi.

Untuk mewujudkannya para pengusaha harus membeli barang modal yang baru. Maka semakin banyak pembaruan yang ingin

dilakukan, makin tinggi investasi yang akan tercapai. Di dunia ekonomi, pembaruan dalam semua sektor ekonomi telah mempertinggi produktivitas di bidang kegiatan ekonomi. Produktivitas yang bertambah tinggi itu di satu pihak, telah memungkinkan pertambahan produksi yang sangat cepat dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Di lain pihak, produktivitas yang bertambah tinggi secara terus menerus telah menaikkan pendapatan para pekerja. Apabila pendapat terus menerus meningkat, permintaan atas berbagai barang akan terus menerus bertambah pula. Dimana keadaan tersebut akan mendorong lebih banyak investasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

e) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan nasional pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah investasi berbentuk otonomi. Walaupun bagaimana, pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak dapat terelakkan. Perlu diketahui bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi.

Dengan kata lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula.

f) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

Dana investasi diperoleh perusahaan dari meminjam atau dari tabungan sendiri. Keuntungan yang besar ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas atau mengembangkan usahanya. Langkah tersebut akan menambah investasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Tidak seperti tabungan dan konsumsi, investasi merupakan sebuah bisnis yang tidak dapat diprediksi dan berisiko, karena investasi tidak harus mengikuti pergerakan produk nasional bruto (GNP) atau jika di tingkat daerah produk domestik bruto (GDP) berbeda dengan pengeluaran konsumsi yang dapat mempengaruhi nilai produk nasional bruto (GNP). Investasi merupakan aktivitas tersendiri dari sector swasta dan sektor pemerintahan. Peristiwa dimana investasi tidak sejalan dengan laju pertumbuhan produk nasional bruto ditemukan pada saat terjadinya resesi dalam siklus ekonomi juga dalam perekonomian yang sedang mengalami inflasi. Jika nilai produk nasional bruto tetap tinggi dan tingkat suku bunga juga tinggi, keadaan ini dapat mengurangi investasi.⁵⁴

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 294.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini dapat terlihat berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Umdatul Husna yang bertujuan untuk Menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Daerah Kota Se Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan metode analisis *ordinary least squares/OLS*. Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 7 Bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan data sekunder dengan objek penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian ini menguji pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur dengan studi kasus seluruh kabupaten.kota Tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian Umdatul Husna menguji Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah.⁵⁵

⁵⁵ Umdatul Husna, “*Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota se Jawa Tengah,*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Penelitian Lina Nabila yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Provinsi DIY. Metode yang digunakan regresi data panel analisis *fixed effect model*. Hasil penelitian yang diperoleh dengan program Eviews 8 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pajak daerah masing-masing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Persamaan kedua penelitian ini yaitu dari segi data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan objek penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian ini menguji pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (studi kasus seluruh kabupaten/kota tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian Lina Nabila menguji pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus: kabupaten/ kota D.I Yogyakarta tahun 2005-2015).⁵⁶

Penelitian Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rumat, dan George M.V. Kawung yang bertujuan menganalisa pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah analisis data regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak signifikan, maka variabel tidak

⁵⁶ Lina Nabila, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2005-2015", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Yogyakarta 2017.

dapat diinterpretasikan sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap Variabel PAD. Jadi kesimpulannya PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong dalam hal ini pembangunan perekonomian masih sangat minim hal ini sangat diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan. Dan jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat. Persamaan kedua penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah dan juga sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (studi kasus seluruh kabupaten/kota tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rimate, dan George M.V. Kawung menguji pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Di Kota Sorong tahun 2015.⁵⁷

Penelitian Gufron Reynaldin Sunandar yang bertujuan mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu *Common effect model*, *Fixed effect model* dan *Random effect model* dengan

⁵⁷ Makdalena, et. al, "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong", *Vol. 05 No. 15, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Manado 2015*.

melalui Uji Chow, Uji Hausman, koefisien determinasi, uji f, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari pengujian statistik ternyata semuanya mendukung hipotesis yang ada. Bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PAD. Persamaan kedua penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah data sekunder serta variabel independen investasi, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (studi kasus seluruh kabupaten/kota tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian Gufron Reynaldin Sunandar menguji pengaruh PDRB, Pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014).⁵⁸

Penelitian Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau

⁵⁸ Gufron Reynaldin Sunandar, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta* 2017.

Pertumbuhan Ekonomi. Persamaan kedua penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (studi kasus seluruh kabupaten/kota tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian ketiganya ini menguji analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Arum Akuarista yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel dengan pilihan estimasi Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan kedua penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder serta objek penelitian Pendapatan Asli Daerah kabupaten/ kota di provinsi. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada variabel penelitiannya. Penelitian ini menguji pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah

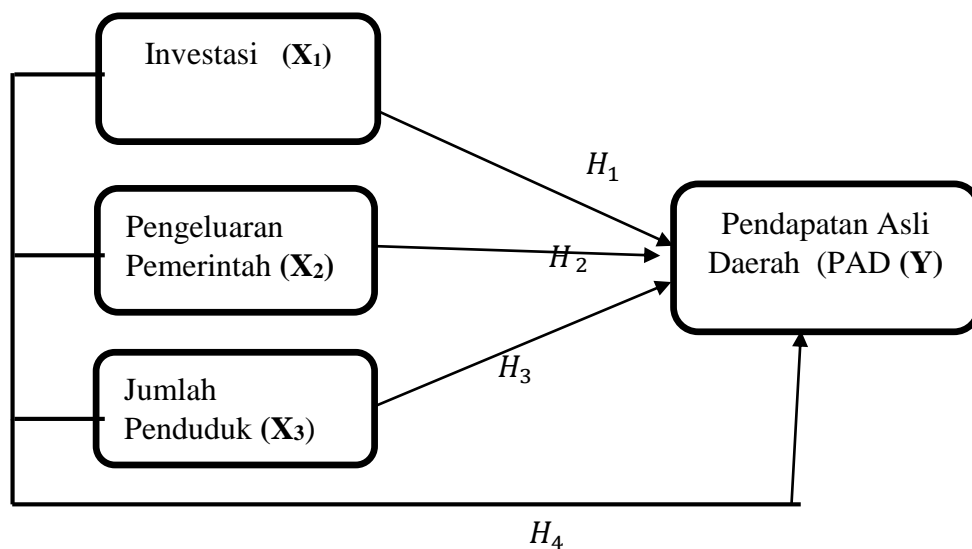
⁵⁹ Chindy Febri, et. al, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013", , *Vol. 02 No. 16, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Manado 2016*.

Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (studi kasus seluruh kabupaten/kota tahun 2016-2017). Sedangkan penelitian Arum Akuarista dan Gregorius N. Masdjojo menguji pengaruh Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012.⁶⁰

G. Kerangka Teori

Gambar 2.2

Kerangka Teori



Keterangan: investasi, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

⁶⁰ Arum Akuarista, "Kajian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah Periode 2008-2012", *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, Semarang tt.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.⁶¹

Berdasarkan kerangka konseptual dan perumusan masalah maka dihipotesiskan sebagai berikut:

1. H₁ : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Investasi terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
2. H₂: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
3. H₃ : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Jumlah Penduduk terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.
4. H₄ : terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 96.